SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : BPK Bahas Piutang Rp 900 Miliar
Entitas / Cakupan : BPK
Sumber / Hal : Galamedia / Hal.2
Edisi : Selasa, 31 Juli 2018

BPK Bahas Piutang Rp 900 Miliar

■ Bersama Pemkot Bandung Sikronisasi Data PBB

PENDOPO, (GM).-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan sikronisasi data dan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 dan semester I tahun 2018.

Selain itu dibahas pula mengenai catatan piutang pajak yang kewenangannya telah berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Seperti diketahui, masih ada piutang PBB yang mencapai Rp 900 miliar.

"Jadi tadi itu rapat dengan BPK untuk pemeriksaan tahap kedua PBB, karena kita masih ada warisan piutang dari pemerintah pusat dulu dengan nilai Rp 900 miliar. Memang sedang kita sisir dengan program sensus dengan ITB supaya kita pahami posisinya," ungkap Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Kota Bandung, Senin (30/7).

Pria yang akbrab disapa Emil ini menjelaskan, piutang PBB tersebut adalah utang warga yang dulu sistem penagihannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan saat ini, semua telah dikelola oleh pemerintah daerah.

"Saya berharap pemeriksaan BPK terhadap data piutang PBB Kota Bandung bisa membuka jalan bagi pemkot untuk bekerja semakin optimal," ucapnya.

Kendati begitu, kata Emil, Kota Bandung memiliki kebijakan khusus mengenai PBB. Perhitungan kebijakan Pajak Bumi Bangunan harus mengusung prinsip keadilan. Artinya, ada pertimbangan-pertimbangan sosial yang digunakan saat menentukan besaran PBB.

"Kami menggunakan kebijakan sosiologis politis, tidak semua orang ditagih begitu saja. Untuk kondisi tertentu, misalnya yang sangat miskin, kan kita nolkan, atau organisasi sosial yang perlu kita bantu," katanya.

Adanya subsidi PBB bagi warga miskin itu sama sekali tidak merugikan negara. Bahkan, dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh BPPD, pemerintah mampu mendongkrak lebih banyak pemasukan.

Di tempat yang sama, kemarin, Emil juga diperiksa oleh Inspektorat selama 10 hari, terkait akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Bandung periode 2013-2018. "Kalau dari Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terkait kinerja lima tahun, semua aspek seperti target RPJMD lalu posisi keuangan. Jadi merupakan rutinitas normal untuk memastikan saya mewarisi kondisi administrasi dan pencapaian kinerja wali kota selanjutnya dengan baik," tuturnya.

Analisa dan evaluasi

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa menyatakan, penyelarasan dilakukan untuk memastikan data piutang pajak yang dikelola Pemerintah Kota Bandung menjadi lebih terstruktur sesuai dengan standar BPK. Selama 35 hari, Tim BPK akan menganalisa dan mengevaluasi atas data yang dikelola Pemkot Bandung.

"Ada beberapa langkah yang menurut kami perlu lebih diperhatikan. Nanti rekomendasi ini akan kami sampaikan langsung melalui BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)," ungkap Arman di Pendopo Kota Bandung.

Analisa oleh BPK, lanjut Arman, akan bermuara pada rekomendasi dan masukan untuk Pemkot Bandung. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah melalui PBB. "Outputnya rekomendasi kinerja untuk perbaikan-perbaikan," tuturnya. (rio)**